

**PENGARUH UMPAN BALIK ANGGARAN DAN KEJELASAN
SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL**
(Studi Empiris pada Pejabat Eselon III dan IV di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo)



SKRIPSI

Untuk Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Jenjang Strata I

Oleh:

AGUS ANDI SETIAWAN
B 200 980 168

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2010

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakekat dari otonomi daerah adalah adanya kewenangan daerah yang lebih besar dalam pengurusan maupun pengelolaan pemerintahan daerah, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan daerah. Mardiasmo (2002) memberikan pendapat bahwa dalam era otonomi daerah tidak lagi sekedar menjalankan instruksi dari pusat, tetapi benar-benar mempunyai keleluasaan untuk meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan potensi yang sebelum era otonomi bisa dikatakan terpasung. Pemerintahan daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat yang bukan hanya terkait dengan pembiayaan, tetapi juga terkait dengan kemampuan pengelolaan daerah.

Perubahan yang terjadi diantaranya terkait dengan proses pengelolaan keuangan daerah khususnya pada model penganggaran yang sebelumnya berbasis pada anggaran tradisional menjadi anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja. Dengan munculnya beberapa aturan baru tentang keuangan daerah seperti undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan daerah yang disusul dengan turunnya peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006, pengelolaan keuangan daerah khususnya penganggaran daerah yang tertuang

dalam proses penyusunan APBD mengalami perubahan yang sangat krusial karena di dalam proses penganggaran tersebut, penyusunan APBD dilaksanakan oleh setiap sub-unit terendah dalam suatu entitas yang berbentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Terkait dengan hal di atas, penyusunan anggaran (APBD) yang melibatkan para pejabat di tiap Kabupaten tidak selamanya berjalan mulus, masalah tersebut menjadikan suatu pertanyaan dalam hal bagaimana mengkaitkan proses penyusunan anggaran dalam sektor publik (pemerintah daerah) dalam sebuah studi berdasarkan teori akuntansi khususnya akuntansi keperilakuan. Salah satunya adalah studi tentang perilaku manajer dalam perencanaan manajerial dalam bentuk keuangan (anggaran) yang dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis. Salah satu ukuran keberhasilan manajer adalah kemampuan dalam pengendalian administrasi yang dilakukan melalui proses peraturan dan kebijakan, prosedur operasi, system insentif dan penganggaran (Hopwood 1976).

Sistem penganggaran merupakan alat yang digunakan untuk perencanaan dan pengendalian manajerial. Penganggaran merupakan bagian penting dari siklus perencanaan, tindakan dan pengendalian manajemen atau secara lebih khusus sebagai bagian dari *total management system*. Dari posisi penganggaran sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian manajerial, anggaran sering dianggap merupakan suatu rencana jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana jangka panjang yang ditetapkan dalam proses pemrograman. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa dalam menyusun anggaran harus dipikirkan semua biaya yang akan dikeluarkan selama bulan berjalan.

Kenis (1979) mengindikasikan bahwa ada lima karakteristik dalam sistem penganggaran. Dalam penelitiannya kelima karakteristik tersebut meliputi: partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, kesulitan sasaran anggaran, umpan balik anggaran dan evaluasi anggaran.

Kenis (1979) menyatakan bahwa umpan balik terhadap tingkat sasaran anggaran yang dicapai merupakan salah satu variabel penting yang memberikan motivasi kepada manajer. Steers (1975) dalam Ratnawati (2004) menemukan hubungan positif dan signifikan antara umpan balik dan kinerja manajerial. Kegunaan umpan balik erat kaitannya dengan siklus pengendalian dan pendekatan modern (Thomas, 1988 dalam Ratnawati, K 2004)

Kejelasan sasaran anggaran menggambarkan luasnya sasaran anggaran yang dinyatakan secara jelas dan spesifik serta dimengerti oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaiannya (Kenis, 1979). Kenis (1979) meneliti pengaruh karakteristik anggaran yang berhubungan dengan pekerjaan (*job-related attitudes*) serta kinerja manajer. Hasilnya kejelasan anggaran berpengaruh positif kepada kinerja. Locke (1968) menyatakan bahwa mencantumkan sasaran anggaran secara spesifik adalah lebih produktif dibandingkan dengan tidak adanya sasaran yang spesifik dan hanya akan mendorong karyawan untuk melakukan yang terbaik. Penelitian Ivancevich (1976) menunjukkan hasil bahwa kejelasan dan spesifikasi sasaran anggaran mempunyai dampak positif terhadap

komitmen pencapaian sasaran anggaran dan menimbulkan kepuasan terhadap karyawan.

Penelitian ini mencoba menganalisis kembali penelitian yang dilakukan oleh Ratnawati (2004), perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti mencoba menganalisis bagian dari Karakteristik Sasaran Anggaran yang berupa Umpan Balik Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang ” **PENGARUH UMPAN BALIK ANGGARAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah beberapa temuan penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten, sehingga menjadi agenda penting dalam penelitian ini sekaligus motivasi peneliti, beberapa pertanyaan penelitian akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Umpan Balik Anggaran terhadap Kinerja Manajerial pada pejabat eselon III dan IV di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo?
2. Apakah terdapat pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial pada pejabat eselon III dan IV di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti secara empiris pengaruh Umpan Balik Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial pada pejabat eselon III dan IV di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pejabat Eselon III dan IV di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk menelaah lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan yang terkait dengan evaluasi kinerja pejabat eselon III dan IV.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disampaikan dalam lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Pada bab pendahuluan akan disampaikan tentang : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab kedua ini memuat tinjauan teoritis dan pengembangan hipotesis yang akan menguraikan tentang: konsep Umpan Balik Anggaran,

Kejelasan Sasaran Anggaran, hubungan antara Umpan Balik Anggaran dan kinerja manajerial, serta hubungan antara Kejelasan Sasaran Anggaran dan Kinerja manajerial.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini akan dijelaskan metoda penelitian yang akan digunakan yang meliputi: desain penelitian, pemilihan sampel dan teknik pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, teknik pengujian kualitas data, uji asumsi multivariat dan teknik pengujian hipotesis.

Bab IV Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab keempat akan menyajikan hasil empiris yang meliputi: hasil pengumpulan data, pengujian kualitas data, uji asumsi multivariat, pengujian hipotesis dan pembahasan.

Bab V Penutup

Pada bab ini penutup akan disampaikan tentang: simpulan, implikasi dan keterbatasan penelitian dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.